

PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH MELALUI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

IMPROVING QUALITY OF EDUCATION AT MADRASAH THROUGH EDUCATIONAL BUDGETING MANAGEMENT

**Slamet Panuntun
(NIDN. 2128038401)**

Dosen STAI Walisembilan Semarang (SETIAWS)

email: tun2wildan@gmail.com

Abstract

Urgency of educational cost management in completing facilities and infrastructures, and also teacher and staff needs in Madrasah Aliyah is always changed, so madrasah carries out cost adjustment with management which more capable to solve problems although it has many weaknesses in maximize every desired needs, so the needs are fulfilled, furthermore the transparency management that will make each stakeholder in madrasah can work well without feel suspicious. Problem in this research is 1) how is the budget planning? 2) How is the payment? 3) How is the cost evaluation? Type of this research is qualitative (natural setting) with the technique of observation, interview, and documentation, and then it's analyzed with the steps of reduction, display, and verification. The result of research is: 1) budget planning for quality improvement was done by each teacher submits proposal about their needs and the submitted to each vice headmaster, next it was submitted to headmaster and then it was continued to foundation to be decided in annual madrasah's budget planning of income and cost, 2) cost implementation was done by dividing each according to meeting agreement about madrasah's budget planning of income and cost efficiently and effectively for improvement of education quality in Madrasah Aliyah, 3) evaluation was done by two ways, if the donation is from government so evaluation was carried out by submitting the school's accountability report to relevant ministry, if the donation was from community, parents, and students so evaluation was done by headmaster and foundation by using E-Budgeting.

Keywords: *quality of education; cost management*

Abstrak

Pentingnya pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam pemenuhan sarana dan prasarana, juga kebutuhan guru dan staf di Madrasah Aliyah yang selalu berubah, sehingga Madrasah melakukan penyesuaian pembiayaan dengan manajemen yang lebih mampu mengatasi permasalahan meskipun banyak kelemahan dalam memaksimalkan dana dengan setiap kebutuhan yang diinginkan sehingga kebutuhan terpenuhi, terlebih transparansi pengelolaan yang akan menjadikan setiap stakeholder di madrasah dapat bekerja dengan baik tanpa curiga. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana perencanaan anggaran 2) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan 3) Bagaimana evaluasi pembiayaan? Bentuk penelitian ini kualitatif (natural setting) dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian: 1) Perencanaan anggaran untuk peningkatan mutu dilakukan dengan setiap guru mengajukan proposal sesuai kebutuhan kemudian diserahkan kepada setiap waka, waka kemudian memberikan kepada kepala madrasah dan diteruskan kepada yayasan untuk disepakati dalam RAPBM tahunan. 2)

Pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan membagi setiap sektor pendidikan sesuai kesepakatan rapat RAPBM secara efisien, efektif demi peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah. 3) Evaluasi dilakukan dengan dua cara, jika dana dari pemerintah maka evaluasi dilakukan pemerintah melalui laporan pertanggungjawaban pihak sekolah ke kementerian terkait, jika dana dari bantuan masyarakat, orang tua, siswa maka evaluasi dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan dengan menggunakan E-Budgeting.

Kata Kunci: Mutu Pendidikan; Pengelolaan Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Madrasah Aliyah dalam hal ini pada (MA) Al-Irsyad Gajah Demak sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terus peningkatan kualitasnya, memberikan prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas sekolah. Peningkatan tersebut akan banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarnya tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.

Untuk meningkatkan kualitas Madrasah Aliyah agar semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi harapan para stakeholdernya membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional baik dalam penggalan sumber dana maupun pendistribusian dananya. Mengelola keuangan bukan menjadi masalah yang mudah di tengah perubahan kurikulum yang terus berubah setiap masa yang membutuhkan kebutuhan sarana dan prasarana penunjangnya, demikian juga kebutuhan dari setiap guru dan staf Madrasah Aliyah yang selalu berubah dengan kebijakan yang ada sehingga dalam waktu tertentu pernah mengalami kekurangan pembiayaan yang

menjadikan sulit mengembangkan program pendidikan.

Madrasah Aliyah mulai melakukan penyesuaian dalam pembiayaan sekolah dengan sistem manajemen yang lebih maju dan mampu mengatasi masalah pembiayaan meskipun masih banyak kelemahan terutama dalam hal memaksimalkan dana yang ada dengan setiap kebutuhan yang diinginkan sehingga semua kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi dengan bersamaan, terlebih lagi masalah transparansi pengelolaan pembiayaan madrasah yang menjadi satu paket yang nantinya akan menjadikan setiap *stake holder* yang ada di madrasah dapat bekerja dengan baik dan tanpa ada rasa curiga.

Sarana dan prasarana yang di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah Demak sangat memadai dengan ruang kelas yang kompetitif baik media dan ruang AC, perpustakaan yang baik dan Madrasah Aliyah menjadi juara satu perpustakaan tingkat nasional, ruang laboratorium yang lengkap baik laboratorium MIPA, IPS, Bahasa dan olah raga.

Berbagai macam pola kendala dan cara Madrasah Aliyah dalam mengatur manajemen pembiayaan menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena kebanyakan madrasah terutama swasta mengalami kesulitan

dalam sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai dalam memberikan imbalan kepada tenaga kependidikannya, selain itu Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi penting dalam manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah bagi peningkatan mutu madrasah.

Berpijak dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan madrasah untuk peningkatan mutu di Madrasah Aliyah?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah?
3. Bagaimana evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di Madrasah Aliyah?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yakni di MA Al-Irsyad Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data kepala madrasah dan keuangan Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah Demak. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah, guru dan staf.

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain:

- 1) Penganggaran peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah.
- 2) Mengamati aktualisasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah.
- 3) Mengamati pengawasan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah.

b. Interview

Metode *interview* ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang:

- 1) Perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah.
- 2) Aktualisasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah.
- 3) Pengawasan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah.

Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah kepala sekolah, staf keuangan, wakil kepala sekolah, guru dan staf.

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini akan diperoleh data-data yang akurat mengenai keadaan umum Madrasah Aliyah seperti data keadaan umum, data keuangan dan data-data tentang pola pembiayaan di Madrasah Aliyah.

d. Uji Keabsahan Data

Penggunaan pengelolaan data ini adalah peneliti mengecek beberapa data (*members check*) yang berasal selain kepala sekolah dan bendahara, peneliti juga mengecek data dari guru, dan staf.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses pengumpulan data, kemudian *data reduction*, *data display*, dan *verification* untuk mengetahui pelaksanaan manajemen keuangan bagi peningkatan mutu peserta didik Madrasah Aliyah.

MUTU PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan disebut sebagai “nilai atau suatu keadaan secara substantif. Mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah suatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam skala”. Dalam konteksnya mutu yang dimaksud adalah dalam konsep relative (Suyardi, 2012).

Kaitannya dengan pendidikan, mutu mencakup input, proses dan output pendidikan atau dengan kata lain, bila dikaitkan dengan pendidikan maka pengertian mutu akan menyangkut dengan semua aspek yang berhubungan dengan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendidik yang mempunyai tiga unsur pokok yaitu masukan, proses kegiatan dan hasil yang lebih sering dikenal dengan istilah *input*, proses dan *output* (Anwar, M.I., 2004).

Sebagai gambaran dari cakupan mutu yang terdiri input, proses dan output dapat dilihat

sebagai berikut:

a. Input

Sekolah yang menerapkan manajemen mutu memiliki input manajemen, dimana semua staf dalam lembaga tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

b. Proses

Proses pengembangan mutu yang dilakukan sekolah perlu melibatkan perlu melibatkan segala yang terkait sekolah khususnya masyarakat dalam mendukung program sekolah, sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik (Suyardi, 2012).

c. Output yang diharapkan

Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output adalah kinerja sekolah. Setiap warga sekolah diharapkan memiliki peran dan meningkatkan kehandalan sekolah di mata masyarakat seperti mampu menciptakan prestasi baik akademik maupun non akademik (Suyardi, 2012).

Indikator-indikator sekolah/madrasah bermutu dapat dijadikan rujukan karakteristik madrasah bermutu, karena penarikan kesimpulan tersebut berdasarkan pada hasil penelitian para ahli.

2. Biaya Pendidikan

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah menyatakan

bahwa pembiayaan madrasah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara madrasah, masyarakat dan sumber dari manapun yang sah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pembiayaan tersebut dipergunakan sebagai biaya investasi, biaya operasi dan personal yang mengarah pada lembaga pendidikan yang berkualitas.

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier.

Jadi biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan bisa dibelanjakan untuk berbagai keperluan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam pendidikan.

Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Mulyasa menyimpulkan:

Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya

pembangunan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan (Suyardi, 2012).

Biaya dalam pendidikan menuntut lembaga pendidikan formal melakukan suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dengan baik. Perhitungan biaya pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (*the real cost*) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*) (Fatah, N., 2000).

3. Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan yang dalam hal ini manajemen pembiayaan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Mulyasa, E., 2004).

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan

menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi (Mulyasa, E., 2002).

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan ini dimaksudkan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan sekolah sesuai dengan yang diharapkan (Mulyasa, E., 2002). Perencanaan ini mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

1) Penerimaan

2) Pengeluaran

c. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistis penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi (Mulyasa, E., 2003).

Kegiatan manajemen

pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan.

4. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat mencapai tujuan dan dapat memuaskan seluruh masyarakat yang memanfaatkan jasa sekolah itu dengan pembiayaan yang baik. Efektifitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan amat penting menyeleksi penggunaan dan operasional, pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang mengarah pada pemborosan, pembiayaan pendidikan perlu diarahkan kepada standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan guru yang jelas untuk mencapai mutu pendidikan (Sagala, S., 2008).

Proses pelaksanaan manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu diantaranya:

a. Perencanaan Keuangan Madrasah

1) Perumusan tujuan

- 2) Memilih program dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber
 - 3) Identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada.
 - 4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.
 - 5) Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah
- b. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah
- Setelah perencanaan keuangan madrasah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan.
- c. Evaluasi Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Madrasah
- Kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan secara sistematis sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas yang mampu

memenuhi harapan semua elemen sekolah tersebut.

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH

Madrasah Aliyah mengembangkan lembaganya dengan menciptakan 3 K yaitu Kultur, karakter dan Konten, Konten di dasarkan pada kurikulum yang dilakukan Kemendikbud, Kemenag dan Madrasah dengan 58 jam pelajaran, Karakter di bentuk agar akhlakul karimah dengan menyediakan pondok pesantren untuk membentuk karakter siswa. Dan kultur dengan membiasakan kebersihan dengan kontrol setiap seminggu sekali kepada guru, siswa, kelas dan lingkungan sekolah dan terbukti lingkungan Madrasah Aliyah bersih.

Semua program tersebut dijabarkan dalam proses pendidikan dan tentunya membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan melalui RAPBM sangat penting, karena filosofi di masyarakat membutuhkan keterbukaan keuangan, namun bukan komersial karena pendidikan merupakan lembaga pendidikan lembaga non profit, namun sehingga perlu diadakan rapat tahunan tentang pembiayaan Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam mengatur keuangan madrasah dengan menggunakan pola manajemen keuangan. Manajemen pembiayaan merupakan satu perangkat untuk efisien dan efektif kegiatan anggaran tersebut, karena sekian banyak rencana pembiayaan dari kegiatan madrasah perlu direncanakan dengan matang dalam rapat tahunan, agar pembiayaan

yang dilakukan dapat tepat guna, diantara kegiatan manajemen keuangan yang dilakukan di Madrasah Aliyah diantaranya:

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah dalam melakukan kegiatan penyusunan anggaran pendidikan memerlukan perhitungan yang matang sebagai langkah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang digariskan, untuk itu Madrasah Aliyah melakukan perencanaan keuangan dengan melibatkan orang tua siswa, komite sekolah dan masyarakat desa. Sebelum perencanaan keuangan madrasah dibuat, dari pihak Yayasan memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua siswa untuk hadir dalam perencanaan anggaran keuangan madrasah.

Perencanaan pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dialokasikan sebagai berikut:

a. Standar isi

Perencanaan pembiayaan standar isi berjumlah 8,547,500 yang diperoleh dari dana BOS 8,547,500 diarahkan bagi peningkatan kualitas kurikulum di Madrasah Aliyah.

b. Standar Proses

Perencanaan pembiayaan standar proses berjumlah 9,192,000 yang diperoleh dari dana BOS 9,192,000 diarahkan bagi peningkatan kualitas perangkat pembelajaran di Madrasah Aliyah.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Perencanaan pembiayaan standar kompetensi lulusan berjumlah 92,952,000 yang diperoleh dari dana BOS 92,952,000 diarahkan bagi peningkatan kualitas peserta didik dalam bidang akademik di Madrasah Aliyah.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Perencanaan pembiayaan standar pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 7,750,000 yang diperoleh dari dana BOS 7,750,000 diarahkan bagi meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, proses hasil KBM dan profesionalisme di Madrasah Aliyah.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Perencanaan pembiayaan standar sarana dan prasarana berjumlah 149,575,000 yang diperoleh dari dana BOS 149,575,000 diarahkan bagi peningkatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki Madrasah Aliyah.

f. Standar Pengelolaan

Perencanaan pembiayaan standar pengelolaan tidak menjadi prioritas peningkatan di Madrasah Aliyah.

g. Standar Pembiayaan

Perencanaan pembiayaan standar pembiayaan berjumlah 67,680,000 yang diperoleh dari dana BOS 67,680,000 diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai bagi

peningkatan profesionalisme dimiliki Madrasah Aliyah.

h. Standar Penilaian Pendidikan.

Perencanaan pembiayaan standar pembiayaan berjumlah 71,573,500 yang diperoleh dari dana BOS 71,573,500 diarahkan bagi peningkatan kualitas kemandirian dan keterampilan siswa Madrasah Aliyah.

Prosesntase perencanaan penganggaran dalam setiap standar mutu pendidikan diantaranya: Standar isi rencana penganggaran sebesar 2%, standar proses rencana penganggaran sebesar 2%, standar kompetensi lulusan rencana penganggaran sebesar 23%, standar pendidik dan tenaga kependidikan rencana penganggaran sebesar 2%, standar sarana dan prasarana rencana penganggaran sebesar 36%, standar pengelolaan rencana penganggaran sebesar 0 %, standar pembiayaan rencana penganggaran sebesar 16 %, dan standar penilaian pendidikan rencana penganggaran sebesar 16 %.

Madrasah Aliyah berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang diperoleh serta pengalokasian untuk program yang akan dijalankan.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran diadakan pemisahan antara keduanya, yaitu penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara yaitu penerimaan dana pendidikan di Madrasah Aliyah ditentukan oleh besarnya dana yang

diterima oleh madrasah dari berbagai sumber dana berasal dari siswa, yayasan, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Secara garis besar program utama pembiayaan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah di berikan dengan post-post antara lain:

a. Post Kurikulum

Ada dua sektor utama yang perhatian dari pendanaan di bidang kurikulum yaitu pengembangan mutu sumber daya manusia melalui detail kegiatan dan peningkatan penunjang kegiatan pembelajaran seperti alat belajar.

b. Post kesiswaan

Ada lima sektor utama yang perhatian dari pendanaan di bidang kesiswaan yaitu:

- 1) Penerimaan siswa
- 2) Keterampilan
- 3) Pengembangan diri
- 4) Bakat minat
- 5) Seni.

c. Post saran dan prasarana

Ada empat sektor utama yang perhatian dari pendanaan di bidang sarana dan prasarana yaitu:

- 1) Pengadaan sarpras untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti pembangunan gedung, asrama, perlengkapan alat bahan
- 2) Pemeliharaan bisa dilakukan secara berkala dan insidental
- 3) Inventerasisasi
- 4) Pemanfaatan dari sarana dan prasarana

d. Pos kegiatan masyarakat
Post kegiatan kemasyarakatan di bawah waka humas, pendanaan pada kehumasan bertujuan agar dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat secara optimal, beberapa kegiatan humas yang membutuhkan anggaran pembiayaan diantaranya:

- 1) Mengadakan pertemuan Wali Murid
- 2) Musyawarah Kegiatan Belajar
- 3) Home visit
- 4) Surat
- 5) Publisitas Sekolah
- 6) HBI dan HBN
- 7) Kalender

e. Post perpustakaan
Beberapa program pendanaan yang dilakukan di Madrasah Aliyah selain mencatat setiap pengeluaran dalam setiap harinya, bendahara madrasah bagian pengeluaran juga membuat laporan keuangan. Adapun laporan yang dibuat adalah laporan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun.

3. Pengawasan atau Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah

Pengawasan atau evaluasi pembiayaan Madrasah Aliyah dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dengan cara mengecek setiap awal bulan serta akhir bulan kepada bendahara.

Pengawasan pembiayaan di bagi menjadi 2, jika dana dari masyarakat pengawasan dilakukan madrasah dan yayasan, kalau dana dari pemerintah dilaporkan kepada pemerintah yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Madrasah Aliyah sedang menyusun program pengawasan melalui melakukan *e-Budgeting* yang aktif dilakukan, dan sekarang dimulai oleh bendahara dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam program excel bukan pada buku lagi, dengan memonitoring setiap bulan sekali berita acara pemeriksaan atau auditing sehingga bisa dilihat siapa saja, karena Madrasah Aliyah yang merupakan madrasah swasta besar maka perlu transparansi pembiayaan madrasah karena rawan dengan penyalahgunaan anggaran.

ANALISIS PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU MADRASAH MELALUI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

1. Analisis Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah

Ada beberapa hal yang dilakukan Madrasah Aliyah dalam melaksanakan perencanaan pembiayaan pendidikan diantaranya:

- a. Penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja Madrasah
Dalam penyusunan rencana anggaran belanja Madrasah di Madrasah Aliyah merencanakan kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Madrasah

dalam jangka waktu 1 tahun kedepan.

Prosentase perencanaan penganggaran dalam setiap standar mutu pendidikan diantaranya: Standar isi rencana penganggaran sebesar 2%, standar proses rencana penganggaran sebesar 2%, standar kompetensi lulusan rencana penganggaran sebesar 23%, standar pendidik dan tenaga kependidikan rencana penganggaran sebesar 2%, standar sarana dan prasarana rencana penganggaran sebesar 36%, standar pengelolaan rencana penganggaran sebesar 0%, standar pembiayaan rencana penganggaran sebesar 16%, dan standar penilaian pendidikan rencana penganggaran sebesar 16%.

Beberapa perencanaan di atas menunjukkan Madrasah Aliyah mengarahkan kegiatan pembiayaan bagi peningkatan mutu Madrasah baik akademik maupun non akademik, fisik maupun non fisik bagi terciptanya lembaga pendidikan yang berkualitas. Madrasah Aliyah juga memfokuskan anggaran untuk mempertahankan kualitas perpustakaan dengan memfosting perkembangan perpustakaan, karena perpustakaan merupakan sumber utama dalam meningkatkan mutu Madrasah dan Madrasah Aliyah memiliki prestasi memuaskan yaitu juara pertama tingkat

nasional dalam pengelolaan perpustakaan.

b. Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah

Pada proses perencanaan telah ditentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, kemudian proses selanjutnya adalah proses pengembangan RAPBM di Madrasah Aliyah dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Madrasah beserta wakil kepala Madrasah, bendahara dan staf tata usaha dalam rapat akhir tahun atau awal tahun dalam rapat ini merencanakan kebutuhan-kebutuhan apa yang memerlukan anggaran dana berdasarkan proposal yang diberikan guru melalui wakil kepala Madrasah baik meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana dan lainnya.

Selain itu, penyusunan rencana program, kegiatan dan pembiayaan Madrasah Aliyah kepada isu-isu strategis bidang pendidikan, serta membuat analisis lingkungan eksternal dan internal yang tertuang dalam analisis SWOT, yaitu analisis yang memuat tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dengan menganalisis kelemahan, dapat diketahui komponen-komponen yang dianggap sebagai faktor penghambat peningkatan kinerja, dan diperlukan strategi peningkatan kinerja untuk menutupi kelemahan tersebut. Analisis kekuatan merupakan suatu

potensi yang dapat ditingkatkan bagi pengembangan institusi. Peluang merupakan suatu data-data dari faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan pengembangan yang harus diberdayakan, sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang mengancam eksistensi organisasi yang harus diminimalisir.

Berbagai perencanaan pembiayaan yang dilakukan di Madrasah Aliyah sesuai dengan pendapat Fattah yang menyatakan perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan pendidikan bermutu yang relevan dengan kebutuhan pembangunan (Fatah, N., 2005). Hal ini dilakukan agar nantinya visi dan misi yang ada pada Madrasah Aliyah dapat tercapai dengan baik melalui perencanaan pembiayaan yang baik sehingga terwujud mutu pendidikan sebagaimana menurut Mulyasa bahwa perencanaan pembiayaan ini dimaksudkan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan sekolah sesuai dengan yang diharapkan (Mulyasa, E., 2002).

2. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah

Pelaksanaan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah dalam prosesnya melakukan berbagai perundingan mengenai hasil dari RAPBM. Biasanya program tersebut yang membutuhkan tambahan biaya disesuaikan dengan besarnya biaya

yang akan dikeluarkan. Dalam pelaksanaannya bendahara bertugas sebagai pengatur apabila ada uang yang masuk baik dari siswa maupun dari pemerintah maupun yayasan. Mengatur bagaimana penerimaan keuangan dipergunakan sebagaimana mestinya. Serta bertugas mengatur pengeluaran untuk dialokasikan kepada masing-masing bidang pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam program kegiatan di RAPBM. Pelaksanaan manajemen pembiayaan Madrasah Aliyah mempunyai dua jenis kegiatan penerimaan dan pengeluaran.

a. Penerimaan

Penerimaan biaya di Madrasah Aliyah berasal dari pendapatan rutin dan non rutin. Pendapatan rutin berasal dari Uang pendaftaran, Uang kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, setiap bulannya dan sumbangan dari orang tua siswa, biasanya dilakukan pada awal tahun berupa infaq pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana dan seragam, uang kegiatan selama 1 tahun dan lain-lain yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pendidikan. Sedangkan pendapatan non rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS dan badan usaha yang dimiliki yayasan dan sukarela Sumbangan sukarela merupakan sumbangan yang di terima Madrasah dari perseorangan maupun masyarakat. Sumbangan sukarela ini berupa hibah, waqaf tanah,

sumbangan material dan sumbangan bangunan. Sebagaimana menurut Siagian (t.th.: 133) bahwa penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh sekolah baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penerimaan keuangan sekolah tersebut bersumber dari pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah dan sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat.

b. Pengeluaran

Pelaksanaan pengeluaran di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah Demak meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pengeluaran rutin meliputi biaya pengeluaran rutin yang setiap bulan dikeluarkan. Pengeluaran non rutin meliputi biaya pengeluaran yang tidak dikeluarkan setiap bulan. Pengeluaran non rutin ini dilaksanakan jika ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang dilaksanakan setiap tahun sekali

dan juga kebutuhan yang sebelumnya direncanakan pada RAPBM.

Secara garis besar program utama pembiayaan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah di berikan dengan post-post antara lain:

- 1) Post Kurikulum
- 2) Post kesiswaan
- 3) Post sarana dan prasarana
- 4) Pos kegiatan masyarakat
- 5) Post perpustakaan

Upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Madrasah Aliyah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dalam madrasah untuk dikembangkan ke rah kualitas yang terbaik yang mengacu pada delapan standar mutu pendidikan. Madrasah Aliyah mengelola sumber-sumber dana dikelola berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil lapangan prosedur penerimaan keuangan Madrasah Aliyah dilakukan berdasarkan prosedur tidak menyimpang dari petunjuk penggunaan dan pengeluaran yang telah di sepakati dalam RAPBM, hal ini sesuai pendapat Mulyasa (2002) bahwa untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung

jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalen keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapaiannya

Merujuk pada kutipan di atas memberi kejelasan bahwa efisiensi merupakan asas yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan. Kondisi ini memberikan peluang cukup besar munculnya nilai ekonomis yang rendah. Ketidakefisienan, karena ketidaktepatan dalam penggunaan dana yang dapat mencakup dalam pengelolaan biaya dari beberapa komponen utama sistem pendidikan, yaitu guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana.

3. Analisis Pengawasan atau Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah

Pengelolaan keuangan Madrasah pada pelaksanaan Madrasah sistem terlalu rumit sehingga apabila ada kebutuhan keuangan untuk program kegiatan mendadak dari masing-masing bidang keuangan maka proses pencairan dana melalui dua tahapan sehingga dana prosesnya berjalan lama ketika dibutuhkan. Selain itu tidak adanya pertanggungjawaban pada komite Madrasah mengakibatkan pertanggungjawabannya hanya pada kepala Madrasah dan bendahara yang mengetahui keuangan. Madrasah Aliyah sedang menyusun program pengawasan melalui melakukan *e-Budgeting* yang aktif dilakukan, dan sekarang dimulai oleh bendahara dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam program excel bukan pada buku lagi, dengan memonitoring setiap bulan sekali berita acara pemeriksaan atau auditing sehingga bisa dilihat siapa saja, karena Madrasah Aliyah yang merupakan Madrasah swasta besar maka perlu transparansi pembiayaan Madrasah karena rawan dengan penyalahgunaan anggaran.

Pemantauan tidak hanya menerima bentuk laporan dari pelaksana kegiatan, tetapi juga menganalisis kesesuaian kegiatan dan rencana, baik dari aspek fisik maupun non fisik di lapangan. Misalnya, memonitor kesesuaian spesifikasi barang, alat atau fisik lainnya antara laporan pertanggungjawaban dengan barang sebelum diberikan kepada

penggunanya oleh panitia pengadaan dan penerima barang.

Sistem pengendalian yang dilakukan *e-Budgeting* dilakukan secara periodik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan internal secara periodik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan lebih dini atau tidak terlalu lama. Karena apabila penyimpangan tersebut sudah terlalu jauh sulit dikendalikan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan, maka pengendalian juga diarahkan untuk mengevaluasi tahapan-tahapan penggunaan keuangan negara, yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengendalian.

Supriadi merinci makna yang terkandung di dalam akuntabilitas adalah, “Cocok atau sesuai dengan peranan yang diharapkan; Menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang tindakan dan keputusan yang diambil; dan suatu performan yang cocok dan meminta pertimbangan kepada orang lain”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek yang terkandung di dalam akuntabilitas antara lain: rasa puas dari pihak lain; model kontrol dan kriteria ukuran (Supardi, D., 2003).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan dari sikap akuntabilitas dalam pengelolaan biaya tercermin dari adanya pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan. Sistem pengendalian yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah

dilakukan secara periodik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan internal secara periodik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan lebih dini atau tidak terlalu lama. Karena apabila penyimpangan tersebut sudah terlalu jauh sulit dikendalikan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan, maka pengendalian juga diarahkan untuk mengevaluasi tahapan-tahapan penggunaan keuangan negara, yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengendalian.

PENUTUP

Simpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka pada sub bab ini dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan anggaran madrasah untuk peningkatan mutu di Madrasah Aliyah dilakukan Perencanaan pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dialokasikan delapan standar mutu pendidikan yang meliputi standar isi yang diarahkan bagi peningkatan kualitas kurikulum di Al-Irsyad Gajah Demak, standar proses yang diarahkan bagi peningkatan kualitas perangkat pembelajaran di Madrasah Aliyah, standar kompetensi lulusan yang diarahkan bagi peningkatan kualitas peserta didik dalam bidang akademik di Madrasah Aliyah, standar pendidik dan

tenaga kependidikan yang diarahkan bagi peningkatan kualitas peserta didik dalam bidang akademik, standar sarana dan prasarana yang diarahkan bagi peningkatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki, standar pembiayaan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai bagi peningkatan profesionalisme guru dan staf dan standar penilaian pendidikan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai bagi peningkatan profesionalisme dimiliki, sedangkan standar pengelolaan tidak menjadi prioritas peningkatan karena merupakan satu paket dari ke tujuh standar dimana pembiayaan yang telah dianggarkan harus dikelola dengan baik dan efisien. Dari perencanaan berdasarkan delapan standar tersebut kemudian dana di aplikasikan dalam post-post yang telah ditentukan diantaranya program utama pembiayaan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah di berikan dengan post-post diantaranya post kurikulum yang diarahkan bagi pengembangan mutu sumber daya manusia melalui detail kegiatan dan peningkatan penunjang kegiatan pembelajaran seperti alat belajar, post kesiswaan yang mengarah pada lima sektor utama yaitu Penerimaan siswa, keterampilan, pengembangan diri, bakat minat dan seni, post saran dan prasarana yang mengarah

pada pengadaan saspras untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan bisa dilakukan secara berkala dan insidental, inventerisasi dan pemanfaatan dari sarana dan prasarana, pos kegiatan masyarakat yang diarahkan pada mengadakan pertemuan wali murid, musyawarah kegiatan belajar, home visit, surat, publisitas sekolah, HBI, HBN dan kalender, terakhir post perpustakaan yang diarahkan pada pengelolaan dan perlengkapan perpustakaan sehingga menjadi perpustakaan yang berkualitas.

- b. Pelaksanaan pembiayaan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah dilakukan dengan membagi setiap sektor pendidikan sesuai kesepakatan rapat RAPBM secara efisien, efektif dan tepat guna demi peningkatan mutu pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah khususnya dalam meningkatkan mutu guru, siswa dan sarana dan prasarana pendidikan untuk dikembangkan ke rah kualitas yang terbaik yang mengacu pada delapan standar mutu pendidikan. Madrasah Aliyah dengan mengelola sumber-sumber dana dikelola berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah
- c. Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di Madrasah Aliyah dilakukan

dengan dua cara, jika dana berasal dari pemerintah maka evaluasi langsung dilakukan pemerintah melalui lapaoran pertanggung jawaban pihak sekolah ke kementerian terkait, jika dana berasal dari bantuan masyarakat, orang tua, siswa maka evaluasi langsung dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan dengan menggunakan sistem *e-Budgeting*, Sistem pengendalian yang dilakukan melalui *E-Budgeting* secara periodik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. Idochi (2004) "Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan Teori, Konsep dan Isu, Bandung: Al-Fabeta".
- Arcaro, Jerome S.(2005), "*Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosol Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar."
- Arikunto, Suharsimi(1998), "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta".
- Departemen Agama RI(2005), "Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: cet. II".
- Fatah, Nanang (2005), "*Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya".
- Moleong, Lexy. J.(2002), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya".
- Mulyasa (2013), "*Pengembangan dan Impelmentasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya".
- Sagala, Syaiful (2008), "*Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta".
- Sumidjo, Wahyo(2001), "*Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Grasindo".
- Suryadi, Ace dan HAL.A.R. Tilaar (1993), "*Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya".
- Supriadi, Dedi (2003), "*Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya".
- Suryadi (2012), "*Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa".
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen